

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Rozali. (2007). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta. PT Raja Grasindo
- Arikunto, S. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara
- Bintarto. (1983). *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Yogyakarta: Gmalia Indonesia
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, James H. Donelly. (1997). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses* Jilid 2, terjemahan Nunuk Adriani, Jakarta, Bina Rupa Aksara
- Darmaputra, Rizal. (2009). *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*, Jakarta, IDSPS Press
- Hadi, Sutrisno. (1994). *Metodologi Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset
- Kusnadi. (2002). *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*. Malang. Taroda,
- Lauer, Dr. Robert H. Lauer. (2001). *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Narimawati, Umi. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung. Agung Media
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. (2005). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Nasution. (2003). *Metode Research*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Nasikun. (2003). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Nazir, Muhammad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Nurcholis, Hanif. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z. Rubbin. (2011). *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Riduwan. (2004). *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Alfabeta

- Robbins, Stephen P. (1996). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, dan Aplikasi*, terjemahan Hadyana Pujaatmaka, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer
- Salim, Agus. (2006). *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. (1989). *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES
- Soekanto, Soerjono. (1989). *Sosiologi Suara Pengantar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soetomo, Drs. (1995). *Masalah Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya,
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, Astrid. (2006). *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*, Bandung. Bina Cipta
- Widjaja, HAW. (2007). *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Widjaja, HAW. (2001). *Titik Berat Otonomi: Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

B. Jurnal

- Dahlan, Abdul Choliq. (2012), *Kajian Undang-Undang Otonomi Daerah Terhadap Persoalan Batas Wilayah*, Jurnal Hukum, Volume 28, Nomor 2, hal. 986
- Permatasari, Ane, (2014), *Otonomi Daerah Perbatasan, Alternatif Solusi Penyelesaian Masalah Perbatasan di Indonesia*, Jurnal Media Hukum, Volume 21, Nomor 2, hal. 227
- Riadi, Bambang dan M. Khifni Soleman, (2011), *Aspek Geospasial Dalam Delineasi Batas Wilayah Kota Gorontalo: Studi Kasus dalam Pemutakhiran Data Batas Wilayah*, Jurnal Globe, Volume 13, Nomor 1. hal. 42

Subrata, Libertus. (2014), *Penetapan Tapal Batas Di Desa Muara Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*, Jurnal S-1 Ilmu Pemerintahan, Volume 3, Nomor 4, hal. 3

Sulistiyono, Djoko. Deden Nuryadin. dan Anung S. Hadi, (2014), *Evaluasi Tim Penegasan Batas Daerah: Studi Kasus di Provinsi Lampung dan Kalimantan Timur*, Jurnal Bina Praja, Volume 6, Nomor 1, hal. 53 – 52

C. Penelitian Sebelumnya (Tesis)

Kristiyono, Nanang, (2008), *Tesis: Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang (Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab dan Dampaknya)*, Semarang, Universitas Diponegoro

D. Surat Kabar Online

Ismiyanto, Agung, (2015), *Polemik Batas Wilayah Kota dan Kabupaten Magelang Tunggu Keputusan Pusat*, Diakses tanggal 25 Oktober 2016. Pukul 20.00 WIB, <http://jogja.tribunnews.com/2015/05/11/polemik-batas-wilayah-kota-dan-kabupaten-magelang-tunggu-keputusan-pusat>.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 Tentang Jenis dan Jenjang Rencana Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Batas Daerah Kabupaten Magelang dengan Kota Magelang Propinsi Jawa Tengah
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Ke Kecamatan Mungkid Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
- Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030